



BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN  
ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2016 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2003 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 Nomor 16 );

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Barito Utara ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Desa adalah desa di Kabupaten Barito Utara.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut BPMD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara.

6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut DPPKA adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara.
7. Camat adalah camat di Kabupaten Barito Utara.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Kades adalah kepala desa di Kabupaten Barito Utara.
9. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
12. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati Barito Utara ini mengatur tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2016.

#### Pasal 3

ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

#### Pasal 4

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibagi kepada setiap desa dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
- b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.

#### Pasal 5

Alokasi Dana Desa (ADD) dialokasikan berdasarkan ketentuan :

- a. alokasi Dana Desa Minimum yang besarnya ditetapkan sebesar 60% dari jumlah ADD yang dibagi sama besar untuk semua desa; dan
- b. alokasi Dana Desa Proforsional yang besarnya ditetapkan sebesar 40% dari jumlah ADD yang dibagi ke semua desa berdasarkan nilai bobot desa.

#### Pasal 6

Penghitungan Alokasi Dana Desa Proforsional setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,33 \times Z1) + (0,22 \times Z2) + (0,22 \times Z3) + (0,23 \times Z4)] \times (ADD_{kab/kota} - AD_{kab/kota})$$

Keterangan:

- W = Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk desa kabupaten
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten
- Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG kabupaten yang memiliki Desa
- ADD kab = pagu Alokasi Dana Desa kabupaten
- AD kab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.

#### Pasal 7

Angka Bobot untuk variabel Alokasi Dana Desa sebagai berikut :

- |                               |         |
|-------------------------------|---------|
| a. jumlah penduduk            | = 33 %  |
| b. angka kemiskinan           | = 22 %  |
| c. luas wilayah               | = 22 %  |
| d. indeks kesulitan geografis | = 23 %  |
| jumlah                        | = 100 % |

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui perindianbukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus).

- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. peraturan desa mengenai APB Desa tahun 2016 yang sudah di verifikasi oleh Camat;
  - b. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) tahun 2015;
  - c. laporan pertanggungjawaban ADD tahap II (40%);
  - d. laporan pertanggungjawaban ADD perubahan / tambahan TA. 2015; dan
  - e. dokumentasi kegiatan ADD TA. 2015.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa tahap I; dan
  - b. dokumentasi kegiatan tahap I (60%).
- (5) Laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diharuskan untuk diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan.
- (6) Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati Barito Utara melalui Camat ke Kepala BPMD cq. Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan.
- (7) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala BPMD membuat surat pengantar kepada Kepala DPPKA untuk menyalurkan Alokasi Dana Desa dari Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.

Pasal 9

Rekening Kas Desa yang dipergunakan untuk Alokasi Dana Desa adalah rekening yang telah dibuka atas nama desa dan pemegang rekening atas nama kepala desa dan bendaharawan desa yang menjabat.

Pasal 10

Penggunaan Alokasi Dana Desa, mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan serta pembinaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA**  
**NOMOR 5 TAHUN 2016**  
**TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN**  
**PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA DI**  
**KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2016**

**PENETAPAN ALOKASI DANA DESA PADA 9 (SEMILAR) KECAMATAN**  
**DI KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2016**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

No.	Kecamatan/ Desa	Jumlah Dana Proporsional (Rp.)	Jumlah ADD Minimum (Rp.)	Total ADD (Rp.)	ADD	
					Tahap I (60%)	Tahap II (40%)
					(Rp.)	(Rp.)
<b>ALOKASI DANA DESA 2016</b>						
I						
<b>I</b>	<b>Kecamatan Teweh Tengah</b>					
1	Lemo I	237.513.612	269.057.878	506.571.490	303.943.894	202.628.596
2	Lemo II	562.983.599	269.057.878	632.041.477	199.224.886	332.818.591
3	Pendren	855.191.904	269.057.878	624.149.782	374.549.869	249.699.913
4	Mimba Sari	108.128.056	269.057.878	437.185.934	262.811.560	174.874.374
5	Ser. Bahayu I	141.508.756	269.057.878	410.566.644	246.339.986	164.226.658
6	Sel. Rahayu II	99.110.397	269.057.878	368.168.275	220.900.965	147.267.310
7	Beringin Raya	121.099.043	269.057.878	390.156.921	234.094.153	156.062.768
8	Datal Nitul	135.627.803	269.057.878	397.655.581	238.611.409	159.074.272
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.816.163.180</b>	<b>2.152.463.024</b>	<b>3.966.626.204</b>	<b>1.379.975.722</b>	<b>1.586.650.482</b>
II						
<b>II</b>	<b>Kecamatan Teweh Baru</b>					
1	Hajah	340.034.672	269.057.878	617.099.350	370.253.730	246.837.020
2	Lang Naga	574.844.345	269.057.878	643.902.373	386.341.334	257.560.889
3	Babulu	196.250.889	269.057.878	705.308.767	459.185.360	306.123.500
4	Majuwulan	200.602.964	269.057.878	549.660.841	329.796.505	219.864.338
	Sikori	159.408.675	269.057.878	428.466.553	257.079.932	171.386.621
	Lang Buah	174.365.153	269.057.878	443.423.031	265.053.819	177.384.212
	Poncon	234.435.371	269.057.878	523.493.249	314.095.949	209.297.300
	Gaudring	132.725.745	269.057.878	401.793.623	241.076.174	160.717.449
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.220.677.813</b>	<b>2.152.463.024</b>	<b>4.373.140.837</b>	<b>2.823.854.303</b>	<b>1.749.316.288</b>
III						
<b>III</b>	<b>Kecamatan Teweh Selatan</b>					
1	Trahuen	296.699.409	269.057.878	565.757.387	339.454.377	226.302.918
2	Bumuk Baru	138.804.436	269.057.878	407.862.514	244.717.388	163.144.026
3	Bulang	240.134.434	269.057.878	504.492.312	305.095.387	203.796.905
4	Bintang Nungg I	166.736.595	269.057.878	435.794.473	261.476.884	174.317.789
5	Bintang Nungg II	240.134.434	269.057.878	500.492.312	305.665.387	203.796.923
6	Trinsing	185.066.294	269.057.878	424.124.472	254.474.683	169.649.759
7	Rudi Sawn	440.223.998	269.057.878	709.881.876	425.920.126	282.952.750
8	Pandau Permai	101.187.358	269.057.878	370.245.236	222.147.142	146.098.094
9	Panduan Raya	138.430.043	269.057.878	407.887.923	244.732.753	163.165.168
10	Teweh Jaya	130.856.178	269.057.878	599.914.156	329.916.494	169.955.203
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.049.873.579</b>	<b>2.890.878.780</b>	<b>4.740.452.359</b>	<b>2.844.271.415</b>	<b>1.890.180.944</b>
IV						
<b>IV</b>	<b>Kecamatan Labai</b>					
1	Ipu	230.078.785	269.057.878	489.536.663	293.961.998	165.974.665
2	Moara Beloi	179.237.020	269.057.878	448.008.808	268.973.339	179.315.559
3	Mukut	320.360.067	269.057.878	589.411.965	353.650.779	235.167.150
4	Julu Baru	270.228.662	269.057.878	539.282.440	323.369.464	215.712.976
5	Moara Inu	240.255.439	269.057.878	509.394.317	305.606.580	203.737.727
6	Bengkabat	165.800.766	269.057.878	434.858.638	260.915.183	173.943.459
7	Rahaden	197.096.806	269.057.878	466.754.884	280.052.810	186.701.874
8	Moara Pin	206.348.097	269.057.878	475.405.973	285.240.585	190.162.380
9	Karendem	527.386.142	269.057.878	596.444.020	357.566.412	238.571.608
10	Haragandang	193.425.301	269.057.878	462.483.079	277.485.847	184.993.232
11	Huring Esep	292.974.217	269.057.878	563.032.125	337.219.275	224.612.653
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.514.513.146</b>	<b>2.369.626.658</b>	<b>5.874.248.804</b>	<b>3.344.349.282</b>	<b>2.229.699.322</b>
V						
<b>V</b>	<b>Kecamatan Labai Barat</b>					
1	Lowe Milli	200.674.643	269.057.878	469.702.520	281.839.512	187.893.008
2	Lowe Hulu	179.157.663	269.057.878	448.215.511	264.929.325	179.286.310
3	Ndalu Hulu	161.740.628	269.057.878	430.708.506	258.479.104	173.319.402
4	Ndalu Hulu	210.431.727	269.057.878	479.889.605	287.933.763	191.955.843
5	Jangkang Luma	156.278.123	269.057.878	425.336.001	255.201.601	170.134.400
6	Jangkang Baru	229.825.195	269.057.878	498.943.071	309.265.943	199.577.228
7	Papar Fujung	278.179.672	269.057.878	547.236.550	328.341.930	218.894.620
8	Pebuk Mawas	206.345.191	269.057.878	477.303.061	296.301.991	190.931.308
9	Bened Hulu	250.318.266	269.057.878	521.376.144	312.825.686	206.350.453
10	Bened Hilir	232.406.693	269.057.878	501.384.571	306.932.743	200.621.528
11	Karamuan	230.320.238	269.057.878	499.378.134	299.626.880	190.751.258
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.340.127.084</b>	<b>2.369.626.658</b>	<b>5.399.763.713</b>	<b>3.179.858.227</b>	<b>2.119.905.485</b>

VII Kecamatan Tambang Timur					
1 Sempiring I	84.381.376	269.057.878	663.039.256	212.003.554	141.335.702
2 Sempiring II	149.959.460	269.057.878	419.017.138	251.430.403	157.606.935
3 Laju	190.758.401	269.057.878	465.816.279	279.489.767	186.396.812
4 Benangka I	241.064.007	269.057.878	510.722.485	306.433.461	204.248.994
5 Benangka II	125.023.362	269.057.878	394.081.180	236.448.708	157.632.472
6 Benangka V	248.974.247	269.057.878	515.032.125	310.819.975	207.919.850
7 Benangka III	139.814.267	269.057.878	406.672.186	245.323.267	163.548.856
8 Muara Wauu	86.275.638	269.057.878	357.333.516	214.400.110	142.933.406
9 Mamprak I	114.066.922	269.057.878	383.124.800	229.874.880	153.244.920
10 Jemur	252.667.396	269.057.878	521.725.274	313.035.164	208.690.110
11 Rej Lip	142.859.514	269.057.878	411.917.392	247.150.435	164.766.957
12 Mamprak II	169.675.466	269.057.878	438.733.354	263.240.018	175.493.346
JUMLAH	1.954.030.618	3.228.694.836	5.182.715.154	3.109.629.093	2.078.086.062
VIII Kecamatan Gantung Parai					
1 Kundui	363.190.176	269.057.878	632.396.054	379.344.832	282.899.222
2 Payung Ara	111.766.215	269.057.878	389.324.003	228.494.456	152.379.637
3 Jaman	135.056.612	269.057.878	405.074.460	243.008.688	162.005.792
4 Pidari	139.056.612	269.057.878	405.074.460	243.008.688	162.005.792
5 Sangkowang	131.136.968	269.057.878	380.894.843	228.476.906	152.277.937
6 Silau	131.210.075	269.057.878	385.267.953	231.160.772	154.107.181
7 Tongku	121.821.365	269.057.878	406.889.053	240.533.558	160.355.705
8 Majangkisan	161.499.040	269.057.878	430.586.918	258.334.151	172.222.167
9 Balis	100.129.090	269.057.878	369.346.968	221.548.181	147.998.787
10 Walur	125.620.429	269.057.878	394.578.307	236.826.984	157.871.323
11 Kempane	51.427.719	269.057.878	350.485.597	210.791.346	140.174.228
12 Ransau	106.097.070	269.057.878	375.155.448	225.090.369	150.062.179
13 Melunggu	130.872.434	269.057.878	399.870.012	239.922.467	159.944.325
14 Baru Raya I	227.813.152	269.057.878	496.871.239	298.122.738	198.749.932
15 Baru Raya II	233.209.902	269.057.878	503.267.780	301.360.666	200.901.112
16 Tapen Raya	185.277.317	269.057.878	454.335.195	272.601.117	181.734.078
JUMLAH	3.458.495.873	4.304.936.048	6.783.421.421	4.068.083.863	3.705.368.568
IX Kecamatan Monalit					
1 Sungai Harapan	99.605.471	269.057.878	358.723.349	215.234.009	143.489.340
2 Linan Besi I	98.250.615	269.057.878	367.308.403	220.385.096	145.923.397
3 Linan Besi II	98.743.453	269.057.878	349.803.510	209.882.106	129.921.404
4 Muara Mea	84.374.232	269.057.878	335.392.113	201.175.368	134.115.845
5 Lawarang	102.501.125	269.057.878	371.049.000	222.989.440	148.659.600
6 Lampeoring I	90.662.523	269.057.878	355.720.401	218.833.241	143.888.160
7 Lampeng II	88.311.266	269.057.878	367.369.144	214.421.488	142.947.356
8 Payeng	109.814.572	269.057.878	378.872.450	227.333.470	151.548.980
9 Berong	96.136.568	269.057.878	365.194.446	219.116.868	146.077.778
10 Brak	79.423.532	269.057.878	348.481.510	209.088.906	139.392.604
11 Tambabe	92.497.484	269.057.878	362.055.362	217.233.217	144.522.145
JUMLAH	994.535.120	2.959.626.658	3.954.469.776	2.372.681.867	1.881.787.911
TOTAL	17.742.330.541	25.022.363.654	42.784.613.195	35.628.767.917	27.108.848.278



Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 4 Januari 2016,



Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2016 NOMOR. 5....

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H.FAKHRI FAUZI,S.Ag,MH  
NIP. 19710921 199803 1 004